



Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, SPIP, dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur)

Mariana Natalia Tri De Wieke Jiman^{1*}, Anthon Simon Y. Kerihi², Minarni A. Dethan³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

jimanikhe@gmail.com^{1*}, giojiman17@gmail.com²

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: jimanikhe@gmail.com^{*}

Abstract This study aims to analyze and explain the implementation of performance-based budgeting, the Government Internal Control System (SPIP), and government performance accountability in the East Manggarai Regency Regional Government, with a case study conducted at the East Manggarai Regency Regional Finance Agency. The research uses a descriptive qualitative method to explore how these three aspects are integrated and applied in the regional financial management system. The findings reveal that the implementation of performance-based budgeting has brought fundamental improvements in financial governance. Budget planning and fund allocation are now more prioritized, economical, efficient, and transparent, supported by a structured and accountable budget presentation system. Furthermore, the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) has generally shown positive outcomes in the management of public resources. This is demonstrated by a strong commitment to integrity, consistent risk evaluation, an integrated control system based on the Regional Development Information System (SIPD), effective communication mechanisms, and thorough monitoring processes. In addition, the performance accountability of the East Manggarai Regency Regional Finance Agency has also improved, as evidenced by regular performance evaluations, participative budgeting processes, and the collaborative establishment of performance indicators. These efforts reflect a growing culture of transparency, accountability, and efficiency in the governance of regional finances. Overall, the integration of performance-based budgeting, SPIP, and accountability mechanisms has contributed significantly to improving the quality of public financial management in the region, indicating a positive trajectory towards good governance in the public sector.

Keywords: Government Internal Control System; Performance Accountability; Performance-Based Budget

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan penganggaran berbasis kinerja, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, dengan studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana ketiga aspek tersebut diintegrasikan dan diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja telah membawa perbaikan mendasar dalam tata kelola keuangan. Perencanaan anggaran dan alokasi dana kini lebih terarah pada skala prioritas, serta dilakukan secara lebih ekonomis, efisien, dan transparan, yang didukung oleh sistem penyajian anggaran yang terstruktur dan akuntabel. Selanjutnya, penerapan SPIP secara umum menunjukkan hasil yang positif dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini tercermin dari adanya komitmen terhadap integritas, evaluasi risiko yang dilakukan secara konsisten, sistem pengendalian yang terintegrasi berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mekanisme komunikasi yang efektif, serta proses pemantauan yang menyeluruh. Selain itu, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Badan Keuangan Daerah juga mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, proses penyusunan anggaran yang partisipatif, serta penetapan indikator kinerja yang dilakukan secara kolaboratif. Upaya-upaya ini mencerminkan tumbuhnya budaya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah. Secara keseluruhan, integrasi penganggaran berbasis kinerja, SPIP, dan mekanisme akuntabilitas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik di daerah, yang menunjukkan arah positif menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja; Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Kinerja aparatur pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat kini mulai merasakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan pada instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan atas akuntabilitas kinerja manajerial pada instansi pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTT, memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, seperti penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2022-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Surplus/(Defisit) (Rp)
2022	1.549.091.707	1.032.164.518	516.927.189
2023	1.217.847.487	1.291.162.487	(73.314.640)

Sumber : <https://searchengine.web.bps.go.id>

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur mengalami pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai Timur mengalami surplus yang cukup signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah pada tahun tersebut mampu menutupi seluruh pengeluaran dan bahkan menghasilkan sisa anggaran. Tahun 2023 terjadi perubahan yang cukup drastis, di mana Kabupaten Manggarai Timur mengalami defisit yang artinya, pengeluaran daerah pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada pos belanja, terutama untuk program bantuan sosial karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Upaya untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah telah melakukan realokasi anggaran dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang tersedia dari tahun anggaran sebelumnya. Defisit APBD ini berdampak terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur, karena akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam mengelola keuangan secara efektif,

untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta membuat pemerintah daerah sulit untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2018:12). Anggaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan instansi pemerintah yang menunjukkan bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan. Penerapan dan pertanggungjawaban anggaran yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil (Pratiwi, 2018).

Pengendalian internal merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan kata lain untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (Tuanakotta, 2013: 127). Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat ukur agar kegiatan dalam instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat digunakan sebagai jaminan bahwa anggaran yang telah ditetapkan akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam dan lengkap. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang melibatkan pengamatan langsung dan wawancara mendalam (Maleong, 2017).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dimana peneliti mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan berupa pertanyaan-pertanyaan sesuai variable yang akan diteliti dan diajukan pada saat wawancara dengan informan penelitian, setelah itu dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ada 3 aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data (data

reduction), Penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

3. HASIL PENELITIAN

Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur)

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja merupakan sebuah strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan setiap biaya yang dialokasikan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang diharapkan, sehingga memastikan bahwa setiap investasi memiliki tujuan yang spesifik dan dapat dinilai. Hal ini dicapai melalui integrasi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, sehingga setiap aktivitas memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala. Indikator kinerja utama digunakan untuk mengukur hasil dan output dari setiap kegiatan, memberikan transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas yang ada, agar penggunaan dana menjadi lebih efektif dan efisien, hal ini mencakup pengelolaan pengeluaran berdasarkan harga yang telah ditetapkan melalui peraturan yang relevan, sehingga memastikan transparansi dan mencegah pemborosan, serta pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada konteks dan tujuan dari setiap kegiatan yang dibiayai, serta kesesuaian dengan nilai pasar yang aktual.

Pengelolaan keuangan suatu program atau kegiatan dapat berjalan efektif dan transparan, maka alokasi anggaran harus dirancang secara spesifik dan rinci. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Ketika sebuah program telah dirinci dengan jelas, mulai dari tujuan, penutup, hingga mekanisme pembiayaannya, maka masyarakat dapat dengan mudah memahami ke mana arah dana tersebut mengalir dan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program tersebut.

Kinerja saat ini belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan masih di bawah 100% dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan upaya lebih lanjut untuk mencapai target PAD.

Tabel 2.Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	33.588.914.74	19.021.385.351	57
2.	Retribusi Daerah	3.002.610.236	2.826.406.463	94
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.065.75.251	10.065.795.251	100
4.	Lain-lain PAD yang sah	15.871.18.670	15.579.650.826	98
5.	Jumlah	62.528.509.906	47.493.237.892	76

Sumber : LRA Kabupaten Manggarai Timur TA. 2023

Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 Terlihat bahwa dari total lima komponen PAD, hanya komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berhasil mencapai target 100%. Komponen Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD, namun realisasinya masih jauh di bawah target, hanya mencapai 57%. Secara keseluruhan, realisasi PAD tahun 2023 baru mencapai 76% dari target yang ditetapkan.

Penetapan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat target kinerja dan prioritas program, melalui analisis mendalam terhadap kebutuhan masing-masing. Hal ini memastikan bahwa alokasi dana disesuaikan untuk mencapai hasil optimal dan memenuhi ekspektasi yang diinginkan. Distribusi sumber daya tidak dilakukan secara merata, melainkan berdasarkan program-program prioritas yang ditentukan oleh analisis kebutuhan utama dari masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, setiap program mendapatkan dukungan finansial yang sesuai dengan pentingnya dalam mencapai tujuan keseluruhan organisasi.

Pemerintah telah menetapkan program-program tertentu dengan anggaran yang sesuai, sehingga penting untuk memastikan pengeluaran dilakukan dengan efisiensi maksimal. Pengelolaan anggaran yang hati-hati dan terencana bertujuan untuk menghindari kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program serta mencegah pemborosan. Badan Keuangan Daerah (BKD) berperan dalam mengelola anggaran secara efisien dengan menetapkan skala prioritas berdasarkan analisis mendalam terhadap masalah yang ada. Dengan pendekatan ini, semua kebutuhan dapat terpenuhi tanpa adanya sisa atau defisit yang merugikan, sambil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi yang dihadapi.

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan suatu proses yang esensial dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan pengelolaan sumber daya publik dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Proses penyusunan anggaran dilakukan secara mandiri dan independen, melibatkan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang langsung terlibat, tanpa adanya intervensi dari luar. Selain itu, evaluasi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan integritas dan etika di badan keuangan telah diterapkan dengan baik, mengikuti prosedur yang ditetapkan dan menerapkan prinsip partisipatif. Kedua aspek ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan.

Setiap tahun dilakukan penilaian rutin terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diawasi langsung oleh inspektorat. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek SPIP dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Seluruh file administrasi diamankan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, dimulai dari proses mendownload dan menginput file ke dalam sistem untuk disimpan secara digital, sementara versi fisiknya dicetak untuk memastikan ketersediaan dokumen. Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan untuk mengelola dokumen penting seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang ditandatangani secara fisik sebagai bukti sah. Pengelolaan yang terstruktur ini membuat pegawai dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sehari-hari mereka, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam operasional badan keuangan.

Sistem ini telah berjalan dengan efektif berkat adanya struktur hierarkis yang jelas, dimulai dari kepala badan hingga eselon IV. Dengan penyampaian informasi dan arahan yang terstruktur secara berjenjang, setiap individu dapat memahami tugas pokok dan fungsinya

dengan baik yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi antar tingkatan berlangsung lancar, sehingga semua pihak dapat terlibat secara efektif dalam pelaksanaan tugas mereka.

Komunikasi di lingkungan kerja diperkuat melalui dua saluran utama: grup WhatsApp dan pertemuan rutin. Grup WhatsApp berfungsi sebagai alat komunikasi cepat dan efisien untuk menyebarkan informasi penting dan memungkinkan interaksi antar pegawai. Sementara itu, pertemuan rutin menyediakan platform bagi berbagai pihak untuk berkumpul, mendiskusikan isu terkini, dan menjalin kerja sama yang lebih baik. Kedua metode ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka, mendukung kolaborasi, dan memperkuat keterhubungan antar pegawai dalam mencapai tujuan bersama.

Proses pelaksanaan kegiatan dalam organisasi dipantau secara ketat oleh pimpinan tertinggi, yang memberikan perhatian penuh untuk memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan yang konsisten ini, bersama dengan evaluasi triwulanan yang dilakukan untuk menilai pencapaian program, menciptakan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi kendala serta faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang, tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik dan pencapaian hasil dari kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini mencakup proses dimana pemerintah menjelaskan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau program tercapai sesuai dengan harapan masyarakat, serta apakah penggunaan sumber daya yang ada dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan triwulanan terhadap hasil kinerja serta pencapaian target memungkinkan penilaian yang mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi kerja. Proses ini mempertimbangkan aspek waktu dan kualitas kinerja yang dihasilkan, serta memberikan kesempatan untuk meninjau kembali berbagai aspek program atau kegiatan. Dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Individu atau organisasi secara konsisten berupaya memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, dengan aktif mengamati perubahan dan dinamika

dalam komunitas. Proses evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan memberikan kesempatan untuk menilai kinerja dan pencapaian, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selain itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan mekanisme terstruktur yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Tingkat Lokal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, melalui pendekatan partisipatif dan evaluatif ini, strategi dan solusi yang dikembangkan akan lebih relevan, representatif, dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja dilakukan melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait dalam rapat berkala, termasuk pimpinan, untuk memastikan bahwa setiap indikator mencerminkan kebutuhan dan tujuan organisasi dengan tepat. Indikator tersebut ditentukan saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) Induk dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah bupati terpilih. Selain itu, di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), indikator juga dirancang dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun. Dengan demikian, semua program kegiatan dan indikator kinerja telah disusun secara terencana untuk dilaksanakan selama lima tahun ke depan, memastikan pelaksanaan yang konsisten dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab dalam organisasi harus diemban secara kolektif oleh semua lapisan, dari tingkat bawah hingga pemimpin puncak, dengan harapan setiap individu berkontribusi untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menciptakan akuntabilitas yang menyeluruh dan menjaga integritas serta transparansi dalam operasional. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap akhir tahun menyajikan informasi komprehensif tentang pencapaian dan dampak kegiatan badan keuangan, serta berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai. Dengan demikian, laporan ini mendukung peran semua pihak dalam pengelolaan yang efektif dan akuntabel.

4. PEMBAHASAN

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah strategi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, target kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja yang sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada badan keuangan secara garis besar telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yaitu secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Namun masih ada beberapa kendala dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada badan keuangan.

Penelitian yang dilakukan pada badan keuangan menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja yang diterapkan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah berhasil mengintegrasikan aspek ekonomis dalam setiap proses penganggaran. Dalam Penyajian anggarannya, badan keuangan juga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya untuk setiap program, sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam penentuan alokasi anggaran. meskipun alokasi anggaran telah dilakukan dengan baik, namun belum diimbangi dengan upaya yang optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif. Melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tanpa adanya pemborosan atau kekurangan dana yang signifikan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Hiola & Mahmud (2024) yang menunjukkan pengelolaan dan penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah menerapkan Anggaran berbasis kinerja dengan standard kinerja yang sudah ditetapkan.

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan landasan hukum bagi penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah Indonesia. Penerapan sistem pengendalian internal di pemerintah daerah khususnya pada Badan Keuangan Daerah Manggarai Timur sudah menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya publik berlangsung dengan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Lingkungan pengendalian di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. hasil evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa kebijakan terkait integritas dan etika telah diterapkan dengan baik dan konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat suatu lingkungan pengendalian yang baik, dimana seluruh pihak terkait berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengelola risiko melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui mekanisme ini, badan keuangan daerah berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menerapkan sistem pengendalian yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai basis pengelolaan dokumen, khususnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis. Dengan demikian, badan keuangan daerah telah membangun fondasi yang kuat untuk pengendalian internal, memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah membangun sistem komunikasi yang efektif dan efisien. Kombinasi dari berbagai mekanisme komunikasi ini telah menciptakan lingkungan kerja yang informatif, komunikatif, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menerapkan sistem pemantauan yang komprehensif untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik dan benar. badan keuangan daerah mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dalam konteks pemerintahan, dimana Sistem pengendalian internal pemerintah dapat dipandang sebagai upaya untuk mengatasi masalah keagenan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ibrahim,dkk (2023) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada bagian keuangan dinilai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun masih perlu dikembangkan lagi penerapannya karena baru saja diterapkan tahun lalu.

Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Di Kabupaten Manggarai Timur, Badan Keuangan Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya publik dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Akuntabilitas kinerja di lingkungan badan keuangan daerah tidak hanya mencakup tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, tetapi juga dalam mengevaluasi serta melaporkan hasil kinerja yang telah dicapai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan landasan hukum yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menerapkan mekanisme evaluasi triwulan untuk menganalisis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui evaluasi ini, kinerja dan pencapaian setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkala. Dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan, serta melakukan pemeriksaan berkala terhadap setiap bidang, efektivitas dan efisiensi kerja dapat dinilai secara objektif.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menerapkan mekanisme perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana kerja, badan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menerapkan sistem perencanaan yang terintegrasi untuk memastikan akuntabilitas program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program telah ditetapkan secara partisipatif melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pimpinan. Indikator-indikator ini sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menerapkan sistem pelaporan yang komprehensif untuk mempertanggungjawabkan semua pencapaian dan dampak dari setiap program yang ada. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara rutin setiap tahunnya memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian dan dampak dari seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, akuntabilitas kinerja pada badan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana stewards mampu memberikan kontribusi positif

bagi organisasi dan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini didukung oleh Maringka,dkk (2024) yang menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Kota Manado telah patuh terhadap Peraturan dalam berbagai aspek pengelolaan kinerja. Hal ini tercermin dari penyusunan Rencana Strategis yang sistematis dan komprehensif, mencakup elemen-elemen penting seperti tugas, fungsi, struktur organisasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur), dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menimbulkan perbaikan mendasar dalam pengelolaan keuangan yang lebih ekonomis, efisien, dan transparan melalui alokasi dana berdasarkan prioritas, yang didukung oleh sistem penyajian anggaran yang jelas.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur secara umum menunjukkan hasil yang positif dalam pengelolaan sumber daya publik yang transparan, efisien, dan patuh terhadap aturan, tercermin dalam komitmen terhadap integritas, evaluasi risiko yang rutin, sistem pengendalian terpadu berbasis SIPD, komunikasi yang efektif, dan pemantauan yang menyeluruh.
3. Akuntabilitas kinerja pemerintah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan hasil yang baik. Melalui evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran, serta penetapan indikator kinerja yang kolaboratif.

Saran

1. Bagi Objek Penelitian

Melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target PAD. Strategi yang lebih terencana dan berbasis data untuk meningkatkan PAD perlu dikembangkan, termasuk memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang belum optimal.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian denganfokus masalah yang lebih bisa mengangkat topik mengenai anggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja secara lebih detail.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur. (2023). Realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022–2023. <https://searchengine.web.bps.go.id>
- Hiola, Y., & Abdul, M. D. (2024). Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 498–504.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1984). Analisis data kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ibrahim, S. D., Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Analisis sistem pengendalian intern dalam peningkatan kualitas laporan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 6(1), 421–423.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi.
- Maringka, M., Sabijono, H., & Datu, C. (2024). Analisis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 pada Dinas Pariwisata Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 11(1), 348–357.
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. (2024). Laporan realisasi akhir anggaran Matim 2023. <https://www.manggaraitimurkab.go.id/download/file/395-lra-matim-2023.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pratiwi, U. G. (2018). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 1–10.
- Tuanakotta, T. (2013). Audit berbasis ISA (International Standard on Auditing). Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.